

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

5.1. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 348 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Jumlah seluruh anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian dan Lembaga yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.461.293.402.000. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan tersebut bersumber dari 4 (empat) Kementerian, yaitu 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1.295.239.471.000, 2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 5.011.300.000, 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 9.574.000.000, dan 4) Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 151.468.631.000.

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Di samping itu, pemberian Tugas Pembantuan tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugas pembantuankan merupakan urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah, yaitu 1) politik luar negeri, 2) pertahanan, 3) keamanan, 4) yustisi, 5) moneter dan fiskal nasional, 6) serta agama.

5.3. Satuan Kerja Yang Melaksanakan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan senilai Rp. 1.461.293.402.000 yang bersumber dari 4 (empat) Kementerian tersebut, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya didelegasikan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada 7 (tujuh) OPD, yaitu:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2. Dinas Perkebunan
3. Dinas Peternakan
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Perikanan dan Kelautan
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan
7. Dinas Bina Marga.

5.4. Program Dan Kegiatan Serta Pelaksanaannya

5.4.1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 memperoleh anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari 4 (empat)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 1.133.981.072.000, yang terbagi dalam 5 (lima) program utama sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.937.116.000. Realisasi anggaran sampai bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp.16.034.133.250,00 atau 89,39%. Rincian kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.
Program, Kegiatan, dan Output Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan**

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Tersusunnya berbagai jenis laporan dari kegiatan: 1. Pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi 5.500 Ha, 2. engelolaan produksi aneka kacang dan umbi 14 laporan, 3. Jumlah Lokasi Ubinan Kedelai 120 lokasi, 4. Peningkatan Produktifitas melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai 500 ha
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan 13 unit
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	Sarana penanggulangan OPT/ DPI 1 Paket, Pemantapan Penerapan PHT 925 ha, Penerapan Penanganan DPI 30 ha
	Sarana penanggulangan OPT/ DPI 1 Paket, Pemantapan Penerapan PHT 925 Ha, Penerapan Penanganan DPI 30 ha	Laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan 12 laporan dan Dukungan Sarana Pascapanen Jagung 6 unit
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	1. Dokumen perencanaan kegiatan/ anggaran tanaman pangan 3 dokumen 2. Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan 12 bulan 3. Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 4 laporan 4. Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal/MP3KI/SIPP (2 Unit) dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 34 unit

Permasalahan dan Solusi dari Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, yaitu:

Permasalahan :

- a. Keterbatasan produksi benih. Hal ini dikarenakan pada saat tanam untuk produksi benih (varietas unggul baru), terkena serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam seperti kekeringan, sehingga perlu ada pengulangan tanam. Akibatnya jadwal tanam untuk penyediaan benih sumber di Balai Pengembangan Benih mundur.
- b. Ketersediaan anggaran untuk proses budidaya yang kurang memadai dan tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan jadwal tanam mundur.

Solusi :

Program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu karena proses budidaya sangat ditentukan oleh masa tanam.

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Hortikultura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.343.870.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 44.697.418.314, atau 60,94%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Program, Kegiatan, dan Output Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan	Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 1.700 m ² , Sarana Prasarana Budidaya 2 unit dan Sarana Prasarana Pascapanen 1 unit
		Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 54 Ha, Sekolah Lapang GAP 4 kelompok dan Sarana Prasarana Pascapanen 150 unit
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Sekolah Lapang GAP untuk 85 kelompok, Sekolah Lapang GHP 4 kelompok, Sarana Prasarana Budidaya 1.499 unit dan Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 6.048 Unit
		Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran 477 Ha
		Pengembangan Kawasan Tanaman Obat 54 Ha.
	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura 24 kali
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Perkantoran 12 bulan	

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.025.413.056.000, dengan

realisasi anggaran sampai bulan Desember 2015 sebesar Rp. 973.584.556.935, atau 94,95%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Program, Kegiatan, Dan Output Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Pengembangan Jaringan Irigasi 207.300 Ha, Layanan Perkantoran 12 unit
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Pengembangan Optimasi Lahan 129.420 Ha, Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) 31.760 Ha.
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Pengembangan alat dan mesin pertanian 50 unit, Fasilitasi penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian 4 paket
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Perkantoran 12 Bulan
	Fasilitas Pupuk dan Pesticida	Fasilitas pestisida untuk pertanian 2 paket, Pendampingan Penyaluran Pupuk 26 pkt.
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 18 paket

Outcome kegiatan adalah terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian.

Permasalahan dan Solusi dari Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu:

Permasalahan:

1. UU No.41/2009, Perda No.27/2010 dan PP No.1/2011 belum terimplementasikan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga alih fungsi lahan masih tetap ada di Kab/Kota;
2. Kondisi fisik jaringan irigasi pada umumnya dalam keadaan kurang baik;
3. Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan sumber air;
4. Petani masih beranggapan bahwa operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tanggung jawab Pemerintah;
5. Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas;
6. Belum menyeluruh penerapan teknologi usahatani terutama di kalangan petani pemula.

Solusi:

1. Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. Melaksanakan program melalui upaya penguatan kelembagaan (*Capacity Building*) pengelola irigasi (KPI) pertanian beririgasi guna mendukung ketahanan pangan;
3. Memperbesar kapasitas produksi;
4. Mengembangkan pendekatan partisipatif;
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat;
6. Membangun kreativitas petani;
7. Menciptakan keselarasan techno-farming dan eco-farming;
8. Membangun system kemandirian;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan irigasi tidak saja untuk padi;
10. Desentralisasi kewenangan pengelolaan irigasi;
11. Konservasi lingkungan berkelanjutan integrasi dengan program lain; Bimbingan teknis dan pelatihan;
12. Fasilitasi kelembagaan P3A/GP3A;
13. Fasilitasi kemitraan;
14. Peningkatan daya guna lahan;
15. Evaluasi kinerja usaha tani;
16. Peningkatan peran serta masyarakat petani menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan irigasi dan lahan yang berkelanjutan;
17. Perlu adanya keberlanjutan dan penguatan peran dari kelembagaan pengelolaan irigasi provinsi dan kab/kota; dan
18. Membangun komitmen antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kab/Kota untuk keberlanjutan pengelolaan lahan dan pengembangan irigasi.

4. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.287.030.000, realisasi anggaran sampai bulan Desember 2015 sebesar Rp. 16.624.355.560, atau 96,17%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Program, Kegiatan, Dan Output Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Pemasaran Domestik	Optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik 7 unit pasar
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan 44 unit, Unit usaha pengolahan hasil hortikultura 2 unit
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	laporan kegiatan dan pembinaan (1 laporan)

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan. Sedangkan Permasalahan dan Solusi dari Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, yaitu:

Permasalahan :

1. Masih relatif kecilnya sarana dan kelembagaan pasar di tingkat sentra produksi yang ada sekarang sehingga petani dan pelaku usaha belum dapat mengembangkan usahanya dengan optimal.
2. Pelaku Usaha/petani yang menerapkan SOP Pasca Panen (GH) yang baik masih relatif kecil.
3. Pendiversifikasian usaha dari produk segar ke olahan masih relatif kecil, hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan permodalan petani/pelaku olahan.
4. Terdapat pergantian petugas maupun lokasi penerima bantuan sehingga berpengaruh terhadap percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
5. Rencana Umum Kebutuhan Kelompok (RUKK) penerima fasilitasi sarana pengolahan dan pasca panen sering berubah-ubah.

Solusi:

1. Adanya penambahan permodalan untuk pelaku usaha yang bermitra dengan STA atau pasar yang sudah terjalin sehingga petani/pelaku usaha dapat meningkatkan usahanya, yaitu dengan cara substitusi dana dari kegiatan UKM APBD Provinsi TA 2015.
2. Penanganan pasca panen perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis pasca panen, penambahan sarana dan prasarana pasca panen serta permodalan.
3. Peningkatan SDM pelaku olahan melalui bimbingan teknis (GMP) baik untuk komoditas olahan hortikultura maupun pangan.
4. Penambahan/peningkatan sarana prasarana alat olahan serta permodalannya.
5. Perlu dilakukan penempatan petugas yang memiliki komitmen serta perlunya pembinaan petugas secara berkelanjutan agar proses kegiatan berjalan lebih cepat.
6. Verifikasi identifikasi lokasi calon penerima bantuan perlu diintensifkan.

7. Pengawasan kepada kelompok penerima hibah agar lebih terkoordinasi sesuai kebutuhan kelompok.

5.4.2. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 memperoleh anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari 2 (dua) Ditjen Lingkup Kementerian yaitu sebesar Rp 111.411.350.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 77.125.433.626, atau sekitar 69,23%, dan realisasi fisik sebesar 81,21%. Dana Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 2 (dua) program utama sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 109.571.450.000, Realisasi sebesar Rp 75.400.736.226, atau sekitar 68,81% dengan realisasi fisik 80,90%. Program ini dilaksanakan meallui beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.151.410.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.438.406.290 (88,55%) dan realisasi fisik sebesar 99,98%.

Output kegiatan:

- 1) Terlaksananya intensifikasi tanaman kopi di Kabupaten Bandung seluas 600 ha, Bandung Barat 100 ha, dan Sumedang 100;
- 2) Perluasan tanaman kopi di Kabupaten Majalengka 100 ha; intensifikasi tanaman teh di kabupaten Bandung seluas 450 ha, Tasikmalaya 250 ha dan Sukabumi 450 ha;
- 3) Rehabilitasi tanaman teh di Kabupaten Bandung seluas 150 ha, Sukabumi 150 ha, Tasikmalaya 175 ha, Purwakarta 150 ha dan Bandung Barat 240 ha;
- 4) Intensifikasi tanaman kakao di Kabupaten Ciamis seluas 200 ha; rehabilitasi tanaman cengkeh di Kabupaten Tasikmalaya seluas 200 ha; intensifikasi tanaman cengkeh di Kabupaten Tasikmalaya 300 ha;
- 5) Terselenggaranya pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka dan Tasikmalaya sebanyak 944 orang; Terlaksananya pemeliharaan Kebun Induk teh di Kabupaten Cianjur seluas 2 ha;
- 6) Terlaksananya inisiasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, Indikasi Geografis (IG) teh dan fasilitasi peningkatan mutu kopi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Majalengka.

Outcome Kegiatan :

- 1) Teraplikasikannya pupuk organik sebanyak 416.000 kg dan Attractant/ Feromone 20.000 set pada tanaman kopi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang; Tertanamnya benih kopi arabika sebanyak 200.000 pohon di Kabupaten Majalengka;
 - 2) Tertanamnya benih teh sebanyak 4.325.000 pohon serta teraplikasikannya pupuk NPK teh sebanyak 572.500 kg di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sukabumi, Purwakarta dan Tasikmlaya;
 - 3) Teraplikasikannya pupuk NPK Kakao sebanyak 70.000 kg dan Feromone sebanyak 1.200 set di Kabupaten Ciamis; Tertanamnya benih cengkeh sebanyak 13.000 pohon dan teraplikasikannya pupuk NPK cengkeh sebanyak 170.400 kg di Kabupaten Tasikmalaya;
 - 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada 944 orang petani tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka dan Tasikmalaya;
 - 5) Peningkatan produksi teh dan tersedianya sumber benih teh seluas 2 ha;
 - 6) Tersajinya data kebutuhan pengembangan kawasan rempah penyegar;
 - 7) Peningkatan harga jual teh dengan terbitnya sertifikasi IG Teh.
- b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.167.370.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 26.276.920.276 (48,51%) dan realisasi fisik sebesar 61,37%.

Output:

- 1) Perluasan tanaman tebu di Kabupaten Subang seluas 100 ha;
- 2) Bongkar ratoon seluas 300 ha di Kabupaten Subang, Cirebon dan Kuningan;
- 3) Rawat ratoon seluas 1.600 ha;
- 4) Fasilitasi Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) 22 orang;
- 5) Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu melalui orientasi dan sosialisasi program, Manajemen Pelatihan dan Pendampingan, Pelatihan Petani, Pelatihan Ketua dan Pengurus Kelompok Tani sebanyak 90 orang di Kabupaten Subang, Cirebon dan Kuningan;
- 6) bantuan peralatan tebu sebanyak 56 unit; terlaksananya pengembangan Data Base Tebu Sistem On Line; Terlaksananya penanaman nilam seluas 10 ha di Kabupaten

Kuningan; serta fasilitasi pemberian penghargaan kepada petani/kelompok tani berprestasi.

Outcome:

- 1) tertanamnya benih tebu sebanyak 3.200 kuintal dan teraplikasikannya pupuk NPK sebanyak 448 ton di Kabupaten Subang, Cirebon dan Kuningan;
- 2) fasilitasi operasional TKP dan PLP-TKP Tebu;
- 3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada petani tebu sebanyak 90 orang;
- 4) tersedianya peralatan tebu sebanyak 34 unit;
- 5) tersedianya sarana pendukung data base tebu sistem online sebanyak 45 unit;
- 6) tertanamnya benih nilam sebanyak 100.000 pohon di Kabupaten Kuningan;
- 7) pemberian penghargaan kepada petani/ kelompok tani berprestasi.

- c. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.303.497.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.989.926.350 (90,51%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Output:

- 1) Peremajaan Karet seluas 100 ha di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) Peremajaan Kelapa seluas 500 ha di Kabupaten Pangandaran;
- 3) Fasilitasi Operasional TKP/PLP-TKP Revitalisasi Perkebunan;
- 4) Pemberdayaan pekebun tanaman tahunan sebanyak 550 orang di Kabupaten Bandung Barat, Sumedang dan Pangandaran;
- 5) Perluasan areal tanam Kemiri Sunan seluas 5 ha di Kabupaten Subang;
- 6) pembangunan Kebun Induk (KI) kelapa seluas 5 ha di Karawang;
- 7) pengadaan GPS tanaman tahunan sebanyak 78 unit.

Outcome:

- 1) Tertanamnya benih karet sebanyak 55.000 pohon dan teraplikasikannya pupuk NPK Karet sebanyak 12.500 kg di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) tertanamnya benih kelapa sebanyak 65.000 pohon dan teraplikasikannya sebanyak 17.500 kg;
- 3) fasilitasi operasional TKP Revitbun; peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekebun tanaman tahunan sebanyak 550 orang di di Kabupaten Bandung Barat, Sumedang dan Pangandaran;

- 4) tertanamnya benih kemiri sunan sebanyak 800 pohon di Kabupaten Subang; tertanamnya benih kelapa sebanyak 800 pohon pada Kebun Dinas di Kabupaten Cianjur.
- d. Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.614.724.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.485.498.285 (95,06%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah 1) Penyediaan penanganan pasca panen tanaman perkebunan sebanyak 18 Poktan; 2) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan; dan 3) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan pada 10 kabupaten. Sedangkan Outcomenya adalah 1) Tersedianya peralatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan pada 18 Poktan; 2) terselenggaranya pertemuan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan; dan 3) terbinanya pelaku usaha perkebunan di 10 kabupaten.
- e. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.548.310.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 6.440.536.025 (85,32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini memiliki Output yaitu 1) Terselenggaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kabupaten Indramayu, Bandung Barat, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta dan Sukabumi dan 2) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim tanaman kopi seluas 2 ha. Outcome kegiatan ini berupa 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan di Kabupaten Indramayu, Bandung Barat, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta dan Sukabumi dan 2) adopsi teknologi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim.
- f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 786.139.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 769.449.000, (97,88%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah 1) Terfasilitasinya Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan selama 12 bulan, operasional Tim Teknis 5 bulan, operasional ULP 15 orang dan 2) Pemantapan Sistem Akuntansi dan Verifikasi selama 12 bulan. Sedangkan Outcomenya adalah:
- 1) Tertibnya administrasi kegiatan Dana Tugas Pembantuan selama 12 bulan;
 - 2) Pengawasan dan pembinaan kegiatan oleh Tim Teknis di kabupaten, tersedia data hasil sistem akuntansi yang valid selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

Sumber anggaran Tugas Pembantuan dari Program ini berasal dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 1.839.900.000,-, Realisasi sebesar Rp 1.724.697.400,- atau sekitar 93,74% dengan realisasi fisik 100%. Adapun kegiatan dari Program ini adalah:

- a. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 371.400.000 dan realisasinya sebesar Rp. 359.746.000 (96,86%) dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi pemasaran komoditi perkebunan. Sedangkan outcomenya adalah terwujudnya fasilitasi pemasaran komoditi perkebunan.
- b. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.312.582.400 (93,09%) dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya alat pengolahan kopi, tersedianya alat pengolahan kopi bubuk, dan tersedianya alat pengolahan aren menjadi gula semut. Sedangkan outcomenya adalah terpenuhinya alat pengolahan beserta bangunannya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil olahan tanaman perkebunan.
- c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.500.000 dan realisasinya sebesar Rp. 52.369.000 (89,52%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi dari Program dan Kegiatan ini adalah:

Permasalahan:

1. Penanaman tembakau seluas 60 ha di Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Majalengka tidak bisa dilaksanakan karena varietas benih bina yang ada tidak cocok di tanam di lokasi tersebut dan tidak diminati petani setempat sedangkan varietas lokal yang ada belum dilepas menjadi benih bina;
2. Pengadaan peralatan tebu (grab loader, vertilizer applicator dan cultivator) tidak dapat dilaksanakan karena topografi kebun tebu di Jawa Barat tidak memungkinkan untuk penggunaan alat tersebut;
3. Pemeliharaan rawat ratoon tebu tidak dapat dilaksanakan karena alokasinya untuk pembelian agens hayati pengendali OPT tebu (penggerek batang/pucuk) yang telah teralokasi pada kegiatan perlindungan perkebunan sehingga akan mengakibatkan overlap kegiatan, disamping itu serangan OPT tersebut masih di bawah ambang ekonomi.

Solusi:

melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait, serta alokasi anggaran untuk sub-sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetor kembali ke Kas Negara dan dianggarkan kembali di Tahun 2016 yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

5.4.3. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015, memperoleh anggaran dana tugas pembantuan dari 3 (tiga) Ditjen Lingkup Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 49.847.049.000. Dana Tugas Pembantuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ini terbagi dalam 5 (lima) program utama sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

- a. Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit, dengan alokasi sebesar Rp. 4.240.390.000,00., dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.718.462.177 (87,69%) dan fisik 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian penguatan sapi kerbau betina bunting. Sedangkan Outcomenya *adalah*: 1) Termonitornya jumlah kelahiran ternak sapi dan atau kerbau dari 720 ekor dan 2) Meningkatnya produktivitas dan produksi ternak dari 1.175 ekor.

- b. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak, dengan alokasi anggaran Rp. 11.933.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 8.048.329.015 (67,44%). *Output* kegiatan ini adalah
 - 1) peremajaan kebun rumput di UPTD BPTSP Cikole;
 - 2) integrasi antara sapi potong dengan tanaman padi sebanyak 2 kelompok di Kabupaten Kuningan dan Indramayu;
 - 3) 120.000 stek rumput berkualitas di kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur dan Sukabumi serta 200.000 stek (bibit) tanaman Indigofera zollingeriana di Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Terbentuknya 1 (satu) kelompok pengolah pakan ruminansia (sapi perah) di Kabupaten Kuningan;
 - 5) Revitalisasi Unit Pengolah Pakan di kelompok pengolah pakan hijauan di Kabupaten Purwakarta;
 - 6) Terdistribusikannya 345 ton pakan sapi perah di 15 kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Kuningan;
 - 7) Terdistribusikannya 18 ton pakan sapi potong induk di 3 kelompok di Kabupaten Indramayu;

- 8) Terdistribusikannya pakan sapi potong penggemukan sebanyak 396 ton di 22 kelompok di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Indramayu, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Pangandaran, Bogor dan Kota Bandung.

Outcome dari kegiatan ini berupa:

- 1) Meningkatnya produksi rumput sebanyak 190 ton bahan segar untuk mencukupi kebutuhan rumput di UPTS BPTSP-HMT Cikole;
 - 2) Termanfaatkannya jerami padi sebagai pakan ternak sapi potong dan termanfaatkannya kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik untuk membantu menyuburkan sawah/kebun peternak;
 - 3) Meningkatnya ketersediaan hijauan pakan ternak di kabupaten baik rumput berkualitas maupun leguminosa sebagai pakan sumber protein.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan pakan konsentrat sapi perah di Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan pakan konsentrat sapi perah.
 - 5) Adanya peningkatan produksi pengawetan pakan hijauan (silase rumput) di kelompok dan meningkatkan pendapatan kelompok;
 - 6) Meningkatnya BCS sapi induk yang diberikan pakan induk berkualitas dari score 3 menjadi rata-rata 3,5.
 - 7) Meningkatnya produksi susu sapi perah di 15 kelompok di Kabupaten Kuningan sebesar 1-2 liter/ekor/hari.
 - 8) Meningkatnya produktivitas sapi potong penggemukan dengan penambahan bobot badan harian sebesar 1 kg/ekor/hari.
- c. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak (TP). dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.760.380.000,- dengan realisasi anggaran (angka sementara) sebesar Rp. 5.577.650.823,- (57,15%). Output kegiatan ini adalah:
- 1) Pengadaan ternak sapi potong beserta pendukungnya di Kab. Kuningan, Sumedang dan Pangandaran;
 - 2) Pengadaan Sapi Perah beserta pendukungnya di Kabupaten Bandung Barat;
 - 3) Penyediaan sarana dan peralatan IB;
 - 4) Pengadaan container IB;
 - 5) Pengadaan ternak domba beserta pendukungnya di Kab. Kuningan, Kota Tasikmalaya dan Kab. Bogor;
 - 6) Pengadaan ternak ayam local di Kabupaten Majalengka dan Kab. Ciamis;
 - 7) Pengadaan Itik beserta pendukungnya di Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat, Kab. Tasikmalaya, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan.

Outcome kegiatan ini berupa:

- 1) Pengembangan budidaya sapi potong di 3 kelompok;
- 2) Pengembangan budidaya sapi perah di 4 kelompok;
- 3) Tersedianya peralatan IB 1 unit;
- 4) Tersedianya container IB sebanyak 8 unit;
- 5) Pengembangan ternak domba di 10 kelompok;
- 6) Pengembangan ternak ayam lokal di 6 kelompok;
- 7) Pengembangan ternak itik di 9 kelompok.

- d. Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 759.470.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 679.620.000,- (89%). Output kegiatan ini adalah fasilitasi sarana rantai dingin di UPTD RPH Kota Cirebon meliputi railing sistem, cooling room dan peralatan RPH. Sedangkan Outcomenya adalah meningkatnya kapasitas pelayanan di UPTD RPH Kota Cirebon.
- e. Revitalisasi dan Fasilitasi Agroindustri Peternakan (susu dan daging) di Jawa Barat. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan mutu dan produk yang dihasilkan oleh kelompok/unit pengolah susu dan daging di Kab/Kota dengan memfasilitasi penataan rumah produksi dan bantuan peralatan pengolahan. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.668.800.000 dengan realisasi penyerapan keuangan sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 1.626.981.000 (97,50%). Output kegiatan adalah pengembangan agroindustri pedesaan komoditi susu dan daging berbasis kelompok di 5 unit usaha pengolahan susu di Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, KBB dan Kota Sukabumi serta 1 unit usaha pengolahan daging di Kabupaten Bogor. Sedangkan outcomenya adalah meningkatkan mutu dan produk yang dihasilkan oleh kelompok/unit pengolah susu dan daging di Kab/Kota tersebut diatas.

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu Pemasaran Hasil Dan Investasi Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyediakan sarana pemasaran ternak yang layak, tepat guna dan sesuai dengan keperluan para stakeholder, dan untuk mengandalikan proses pemasaran terak agar hanya ternak yang legal dan sehat yang beredar di tengah masyarakat. Dan dalam upaya untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak, sehingga sistem pemasaran ternak harus lebih transparan baik dalam menentukan harga maupun berat ternak. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.762.900.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.324.380.173,- (92,39%). Output kegiatan ini yaitu 1)

Terlaksananya pembangunan dan revitalisasi pasar ternak di 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cirebon, Garut, Subang, Ciamis, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, tersedianya peralatan sarana pemasaran di Pasar Ternak di 7 (tujuh) Kabupaten Kota yaitu: Kabupaten Cirebon, Subang, Ciamis, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya dan 2) Tersedianya fasilitasi pemasaran hasil peternakan untuk Poktan/gapoktan di Kabupaten Sukabumi, Ciamis, dan Garut. Dari 2 (dua) output tersebut diperoleh Outcome berupa tersedianya bangunan fasilitasi pemasaran hasil peternakan untuk Poktan dan Gapoktan di Kabupaten Sukabumi, Ciamis, dan Kabupaten Garut.

Permasalahan dan solusi dari kegiatan ini adalah:

Permasalahan:

- a. Permasalahan pakan ternak terutama hijauan terlambat pelaksanaannya dikarenakan penanaman rumput/tanaman pakan harus bersamaan pada saat musim penghujan sehingga pelaksanaan baru terlaksana di bulan November 2015.
- b. Penguatan pakan ternak baik untuk sapi penggemukan, sapi perah ataupun sapi induk pelaksanaan disesuaikan dengan keluarnya e-catalog pakan ternak pada bulan Juli 2016. Efektif pengadaan pakan dan pendistribusian baru terlaksana di pertengahan Agustus 2015. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
- c. Pada kegiatan pakan ternak terdapat banyak item pekerjaan berupa pengadaan barang yaitu alat/mesin/ bangunan dan ternak sehingga proses pencairan anggaran membutuhkan waktu dan hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- d. Pada kegiatan Peningkatan Produksi Ternak (Tugas Pembantuan) kegiatan pengembangan ternak domba yang dilaksanakan untuk 10 kelompok hanya terealisasi di 1 (satu) kelompok yaitu di Kab. Kuningan yang merupakan kegiatan APBN Murni sedangkan 9 (sembilan) kelompok lainnya tidak jadi diberikan bantuan ternak beserta pendukungnya karena pada saat penetapan pemenang lelang ternyata pemenang lelang mengundurkan diri sebagai penyedia sebelum kontrak di tandatangani, sedangkan proses selanjutnya ditawarkan kepada peserta lelang urutan kedua dan ketiga namun tidak ada yang menyanggupi dengan waktu kurang dari 45 hari, akibatnya anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tidak digunakan. Pembangunan kandang koloni untuk sapi perah pada tahun anggaran 2015 tidak sempat diajukan untuk dicairkan sehingga belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 191.529.000,- sedangkan fisik sudah selesai 100%. Selain itu sisa anggaran juga bersumber dari efisiensi pengadaan barang dan jasa serta beberapa kegiatan pendukung yang tidak bisa dilaksanakan diantaranya

penanaman pakan hijauan sehubungan dengan kemarau panjang dan waktu yang mendesak di akhir tahun anggaran.

- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang ada di UPTD RPH Kota Cirebon karena jumlah pemotongan yang masih sedikit.

Solusi:

- a. Pelaksanaan penanaman hijauan seharusnya segera dilaksanakan saat musim penghujan masih ada di bulan Januari s/d Maret. Diharapkan anggaran sudah dapat direalisasikan pada bulan Januari.
- b. Pihak LKPP agar sesegera mungkin menyiapkan perusahaan khususnya bidang pakan ternak.
- c. Penyedia barang seharusnya dapat mengajukan uang muka dan percepatan dalam penyelesaian administrasi pencairan.
- d. Optimalkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan agar target output tetap tercapai. Mengajukan revisi DIPA untuk kegiatan Tahun 2016 agar dapat dialokasikan atau merevisi DIPA dengan tidak mengurangi output kegiatan.
- e. Sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan jumlah pemotongan ternak dan pemanfaatan sarana yang ada.

5.4.4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 menerima dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 5.011.300.000,00. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.886.740.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.652.679.786,00 atau 74,75%. Output dari Program ini adalah Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di wilayah strategis, Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan, Pelayanan teknis administrasi. Adapun Outcomenya adalah terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.560.000. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.

119.344.000 (95,81%). Output kegiatan berupa Layanan perkantoran, dan Outcome adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasikan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.

Permasalahan dan Solusi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, adalah:

Permasalahan:

- a. Minat bertransmigrasi cukup banyak, sementara target yang tersedia dari pusat terbatas. Upaya Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pusat/Kementerian.
- b. Kesiapan daerah penempatan dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman transmigrasi belum semuanya dapat terselesaikan sehingga berdampak pada realisasi penempatan transmigran asal Jawa Barat tidak sesuai dengan target dan jadwal.

Solusi:

- a. Koordinasi dengan Kemenakertrans RI dan daerah penempatan.
- b. Masih ada sebagian warga transmigran yang belum mengoptimalkan lahan yang diberikan oleh Pemerintah.
- c. Melakukan koordinasi dengan Ka. UPT dan Kabupaten penempatan setempat,
- d. Belum adanya keterpaduan pemberangkatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi.
- e. Petugas Kab/Kota dalam melaksanakan pendaftaran belum mengacu pada Kepmen No. 208/men/X/2004 sehingga masih ditemukan usia yang melebihi batas usia maksimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pendaftar di Kab/Kota.
- g. Adanya efisiensi volume kegiatan kedepan akan dilakukan penyesuaian kegiatan melalui revisi anggaran.

5.4.5. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Program dan kegiatan yang difasilitasi dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 9.574.408.000, yang terdiri dari Program Perikanan Tangkap sebesar Rp. 3.156.541.000, Program Perikanan Budidaya sebesar Rp. 4.327.359.550, dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan sebesar Rp. 1.015.991.734.

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.837.781.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.721.631.000 (93,67%). *Output* kegiatan ini adalah 1)

terlaksananya pengadaan *Converter* BBM ke Gas sebanyak 100 unit dan 2) terlaksananya pengadaan *freezer* sebanyak 2 (dua) unit. Sedangkan Outcome kegiatan berupa meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.434.910.000 (95,66%). *Output kegiatan ini yaitu* terlaksananya pengadaan rumah ikan (Fish Apartemen) sebanyak 1 (satu) unit. Sedangkan Outcome kegiatan berupa meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

Permasalahan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah:

- 1) Struktur armada penangkapan masih menggunakan armada penangkapan tradisional, untuk itu dilakukan upaya restrukturisasi armada penangkapan diantaranya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan,
- 2) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan seperti prasarana TPI/PPI, untuk itu dilaksanakan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan sarana dan prasarana, dan
- 3) Menurunnya stok sumber daya ikan di laut dan perairan umum dikarenakan terjadi degradasi kualitas lingkungan, untuk itu dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan perairan yang ditindaklanjuti dengan pengkayaan stok sumber daya ikan.

2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.058.927.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.241.989.550 (83,85%). Output kegiatan ini berupa 1) terpenuhinya jumlah induk unggul sebanyak 2.236.067 induk; terpenuhinya jumlah benih ikan yang bermutu sebanyak 4.435.791 juta induk; 2) Tersedianya unit pembenihan skala besar sebanyak 4 (empat) unit; dan 3) Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi, 2 (dua) unit. Kegiatan ini memiliki Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 221.736,58 Ton.
- b. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.880.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.370.000 (73,04 %). Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pengelolaan satuan kerja selama 12 bulan, tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan dan aset milik negara sebanyak 2 (dua) dokumen. Sedangkan Outcomenya adalah Meningkatnya tertib administrasi kegiatan.

Permasalahan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, adalah:

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan masih rendah, untuk itu dilakukan peningkatan penyediaan induk/benih yang berkualitas dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
- 2) Sarana dan prasarana budidaya masih rendah, dilakukan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya.

3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Produk Dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.966.244.500 (96,62%). Output kegiatan ini adalah:
 - 1) terlaksananya pengadaan sarana rumah kemasan di Kabupaten Sukabumi 1 (satu) paket, pengadaan sarana pengolahan dan SRD di Kabupaten Bekasi 1 (satu) paket dan Kabupaten Ciamis 1 (satu) paket, pengadaan sarana prasarana pengolahan di Kabupaten Cirebon (1 paket) dan Tasikmalaya (1 paket), pengadaan sarana kelengkapan mobil klinik mutu 1 (satu) unit dan kendaraan roda-4 1 (satu) unit;
 - 2) terlaksananya pengadaan peralatan Sistem rantai Dingin (SRD) di Pelabuhanratu (1 paket), Kabupaten Indramayu (1 paket) dan Kabupaten Subang (1 paket).

Sedangkan Outcome kegiatan adalah meningkatnya produk dan usaha pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing.

- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.820.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.49.747.234 (81,79%). Output kegiatan ini berupa terlaksananya perencanaan dan pelaporan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tertib administrasi kegiatan.

5.4.6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 menerima anggaran Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.661.298.000, realisasi anggaran sebesar Rp 97.423.350.529 (96,78%) dan progress fisik 99,42%. TPOP ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Survey dan Investigasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 2.326.843.000, realisasi anggaran sebesar Rp 2.013.341.475 (86,53%) fisik 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penelusuran/survey jaringan irigasi yang dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan/inspeksi saluran dan bangunan seluruh jaringan irigasi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi baik saluran ataupun bangunan dan perhitungan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) sehingga dapat tersusunnya buku laporan AKNOP di 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Staf Pelaksana Kegiatan sebanyak 80 orang dan Kelembagaan O dan P di Daerah (UPT/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, P3A/GP3A/ IP3A Mitra Cai). Sedangkan Outcomenya adalah tercapainya informasi penyusunan program O dan P Jaringan Irigasi di 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat sesuai target rencana.

2. Kegiatan Operasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 46.645.378.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 45.611.638.750, (97,78) fisik 98,82%. Output kegiatan ini berupa a) terlaksananya operasi dan pengaturan Jaringan Irigasi sebanyak 17 Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada di provinsi Jawa Barat berupa:
 - a) pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll);
 - b) Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit; Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll;
 - c) Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberianair (termasuk pekerjaan: membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
 - d) Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
 - e) Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
 - f) Koordinasi antar instansi terkait;
 - g) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi.

Outcome kegiatan ini adalah terkelolanya jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan baik dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 19.763.411.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 19.301.298.850 (97,66%) fisik 99,67%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin melalui perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus

tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti berupa pemberian minyak pelumas pada bagian pintu, pembersihan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, pembersihan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur, dan pemeliharaan tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran, serta yang bersifat perbaikan ringan berupa penutupan lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan dan perbaikan kecil pada pemasangan. Kegiatan ini banyak melibatkan peran petugas operasi dan pemeliharaan dalam penggunaan peralatan lapangan seperti cangkul, parang, sabit, garuk, sepatu kerja, topi, jas hujan, senter, meteran/ rol meter, rompi dan pelampung.

Outcome kegiatan adalah mempertahankan kondisi jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat secara terus menerus dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 29.671.659.000 realisasi anggaran sebesar Rp 28.513.114.229 (96,10%) fisik 99,80%. Output kegiatan berupa terlaksananya perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala pada saluran irigasi sepanjang 685,02 Km dan 1.623 buah bangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola maupun kontraktual yang terbagi dalam tiga pekerjaan yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian, Outcome: mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan air ke areal persawahan dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

5.4.7. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 menerima anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 50.807.333.000, dengan realisasi Rp. 49.471.952.000 atau 97,37%. Anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.573.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.571.728.000 atau 99,97% realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini berupa terlaksananya perawatan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 56,01 km. Sedangkan Outcomenya berupa terpertahkannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.302.498.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.301.923.000,00 atau 99,96% realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 1.234,41 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai dengan umur rencana.
3. Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.916.629.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 35.899.461.000, atau 99,95% realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan berupa terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 13,22 km. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.
4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,00 Milyar, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.385.080.000 atau 87,70% realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan nasional sepanjang 20,50 m. Sedangkan Outcomenya adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.
5. Kegiatan Sistem Pelaporan (e-Monitoring) dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.827.000 realisasi anggaran Rp. 34.327.000 atau 78,32% realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan inputing data keuangan kedalam system e-monitoring dan Outcomenya adalah terpenuhinya dan termutakhirkannya data keuangan.
6. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Layanan Perkantoran) dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.971.379.000 realisasi anggaran Rp. 3.279.434.000 atau 82,58% realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. Sedangkan Outcomenya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja.